WARGA YOGYA DINILAI MAMPU MEMAHAMI Kebijakan PSSB Perlu Dipertegas

YOGYA (KR) - Kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dinilai perlu ada ketegasan. Terutama menyangkut mobilitas antarkota yang berkaitan erat dengan aktivitas mudik.

Hingga saat ini belum ada kebijakan yang tegas mengenai aktivitas mudik. Sebagian daerah masih sebatas imbauan agar tidak melakukan mudik. "Bagi Kota Yogya, aturan mengenai mobilitas antar kota itu penting karena ada tradisi mudik yang cukup tinggi. Misalnya ada aturan tentang mudik itu ada, maka kita pun harus siap-siap antisipasi bersama untuk kenyamanan semuanya," ungkap Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Sabtu (4/4).

Jika mudik diperbolehkan, menurut Heroe, perlu ada pengaturan-pengaturan baik dari daerah asal maupun tujuan pemudik. Salah satunya protokol kesehatan agar sebelum melakukan perjalanan harus dicek kesehatannya. Jika dalam kondisi sehat, bisa kembali melanjutkan ke daerah tujuan. Sebaliknya ketika tidak sehat tentunya perlu ada penanganan. Selama dalam perjalanan pun harus ada protokol yang diterapkan.

Heroe menambahkan, hingga awal April tercatat ada 1.022 warga pendatang yang masuk Kota Yogya. Mereka tersebar di selu-

ruh kelurahan dan dapat diterima dengan baik oleh keluarga namun tetap mengedepankan antisipasi. "Sebagian besar dari mereka sudah melakukan isolasi diri. Tetapi kondisi kesehatannya harus tetap dipantau. Nah, kebijakan mudik ini belum ada. Kalau sekolah dari rumah, kerja dari rumah maupun social distancing sudah dijalankan semua," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nugroho mengaku belum ada kebijakan memperketat daerah perbatasan. Warga yang datang ke Kota Yogya pun sudah tidak lagi menggunakan angkutan umum karena banyak angkutan jarak jauh yang dibatalkan oleh penyedia layanan.

Menurutnya, warga Yogya sudah mampu memahami makna *social distancing* dengan baik. Tempat-tempat umum yang kerap menjadi titik keramaian saat ini kondisinya sepi. Banyak warga yang memilih berada di rumah dan baru ke luar jika ada kepentingan mendesak. "Jika masyarakat sudah mampu memahami itu nilainya lebih tinggi dibanding kita lakukan pengetatan. PSSB dari kementerian sifatnya imbauan. Layanan mudik dengan armada bus oleh BUMN juga dibatalkan. KAI juga membatalkan ratusan perjalanan kereta jarak jauh," urainya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005